RENCANA STRATEGIS

DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2016 - 2021

Pemerintah Kabupaten Tuban
Dinas Perikanan dan Peternakan
Jl. Raya Merakurak KM 4 Tuban

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban Tahun 2017 - 2021 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban.

Sehubungan dengan hasil evaluasi kinerja pembangunan perikanan dan peternakan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban Tahun 2020 yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) harus berorientasi pada kewenangan OPD dan outcome yang dicapai, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan IKU dan target pada tahun 2020 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban Tahun 2017 – 2021.

Rencana Strategis ini selanjutnya dipergunakan sebagai acuan setiap unit kerja lingkup Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban untuk perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020.

Tuban, April 2020
Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Tuban

Dr. Ir. M. AMENAN, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19650807 199003 1 018

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii

BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 1
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 5
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 5
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 9
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 21

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 23
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 23
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih 23
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra 25
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 28
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 30

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN 31
4.1 Tujuan 31
4.2 Sasaran 31

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 33
5.1 Strategi 33
5.2 Kebijakan 33

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 34

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 36

BAB VII. PENUTUP 37

LAMPIRAN 38

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan perikanan dan peternakan yang direncanakan mulai pada tahun 2016 sampai dengan 2021 merupakan proses pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka memanfaatkan potensi sumberdaya perikanan dan peternakan di Kabupaten Tuban. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan komprehensif untuk kurun waktu 5 tahun kedepan. Rencana Strategis selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) OPD, sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Acuan utama penyusunan Renstra OPD adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2016 – 2021 yang merupakan rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Indikatif Kepala Daerah/Wakil Daerah terpilih yang telah disampaikan kepada masyarakat pemilih dalam Sidang Paripurna DPRD dalam tahapan kampanye pemilihan pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Renstra 2016 – 2021 Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. SE Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 20 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan RPJ dan RPJM Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Tuban Tahun 2012 – 2032;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tuban Tahun 2005 – 2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 – 2021;

17. Peraturan Bupati Tuban Nomor 58 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 adalah meningkatnya pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang kelautan, perikanan dan peternakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Berdasarkan pertimbangan ini maka Renstra OPD disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Tersusunnya tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun;

2. Teridentifikasinya program dan indikator kinerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun;

3. Tersusunnya acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja untuk waktu 5 (lima) tahun ke depan;

4. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Tuban.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra OPD Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban Tahun 2016 – 2021 disusun sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN, memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, Sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra k/l dan renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, memuat tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, memuat indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Menunjuk Bab III Pasal 3 disebutkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah Dinas Daerah Kabupaten Tuban terdiri salah satunya Dinas Perikanan dan Peternakan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dan bidang pertanian. Dinas Perikanan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang perikanan dan peternakan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perikanan dan peternakan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diimplementasikan dengan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, peternakan dan kesehatan hewan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, peternakan dan kesehatan hewan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, peternakan dan kesehatan hewan;
d. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, peternakan dan kesehatan hewan;
e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, peternakan dan kesehatan hewan;
f. penyelenggaraan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, program dan pelaporan;
g. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab dinas;
h. perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;

i. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;

j. pembinaan terhadap UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016. Susunan organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan terdiri atas :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat
c. Bidang Perikanan Tangkap
d. Bidang Perikanan Budidaya
e. Bidang Peternakan
f. Bidang Kesehatan Hewan
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
h. Kelompok Jabatan Fungsional

Subbagian dan seksi masing-masing dipimpin oleh sekretaris dan kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris dan kepala bidang.

(1) Sekretariat membawahkan dan mengkoordinasikan :
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Subbagian Keuangan; dan
   c. Subbagian Program dan Pelaporan.

(2) Bidang Perikanan Tangkap membawahkan dan mengkoordinasikan :
   a. Seksi Eksploitasi dan Teknologi;
   b. Seksi Kenelayanan; dan
   c. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap.

(3) Bidang Perikanan Budidaya membawahkan dan mengkoordinasikan :
   a. Seksi Pembudidayaan dan Produksi;
   b. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
   c. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya.

(4) Bidang Peternakan membawahkan dan mengkoordinasikan :
   a. Seksi Pengembangan Ternak dan Teknologi;
   b. Seksi AgribinisPeternakan; dan
   c. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan.

(5) Bidang Kesehatan Hewan membawahkan dan mengkoordinasikan :

a. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Medik Veteriner;
b. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; dan
c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

(6) UPTD Perikanan dan Peternakan terdiri dari :

a. UPTD Pengelolaan TPI membawahi TPI Palang, TPI Karangagung, TPI Plaza Ikan, TPI Glondonggede, TPI Bulu;
b. UPTD Perikanan Air Tawar/ Payau membawahi Balai Benih Ikan Jojogan Kecamatan Singgahan dan Balai Benih Ikan Banjararum Kecamatan Rengel;
c. UPTD RPH Kabupaten Tuban;
d. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan Kabupaten Tuban;

Dalam pelaksana tugas dan fungsinya, kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala seksi, kepala UPTD dan kelompok jabatan fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing masing maupun antar instansi dalam daerah maupun luar daerah.

Adapun struktur organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TUBAN

Lampiran : Peraturan Bupati Tuban

Nomor : 58 Tahun 2016

Tanggal : 27 Oktober 2016

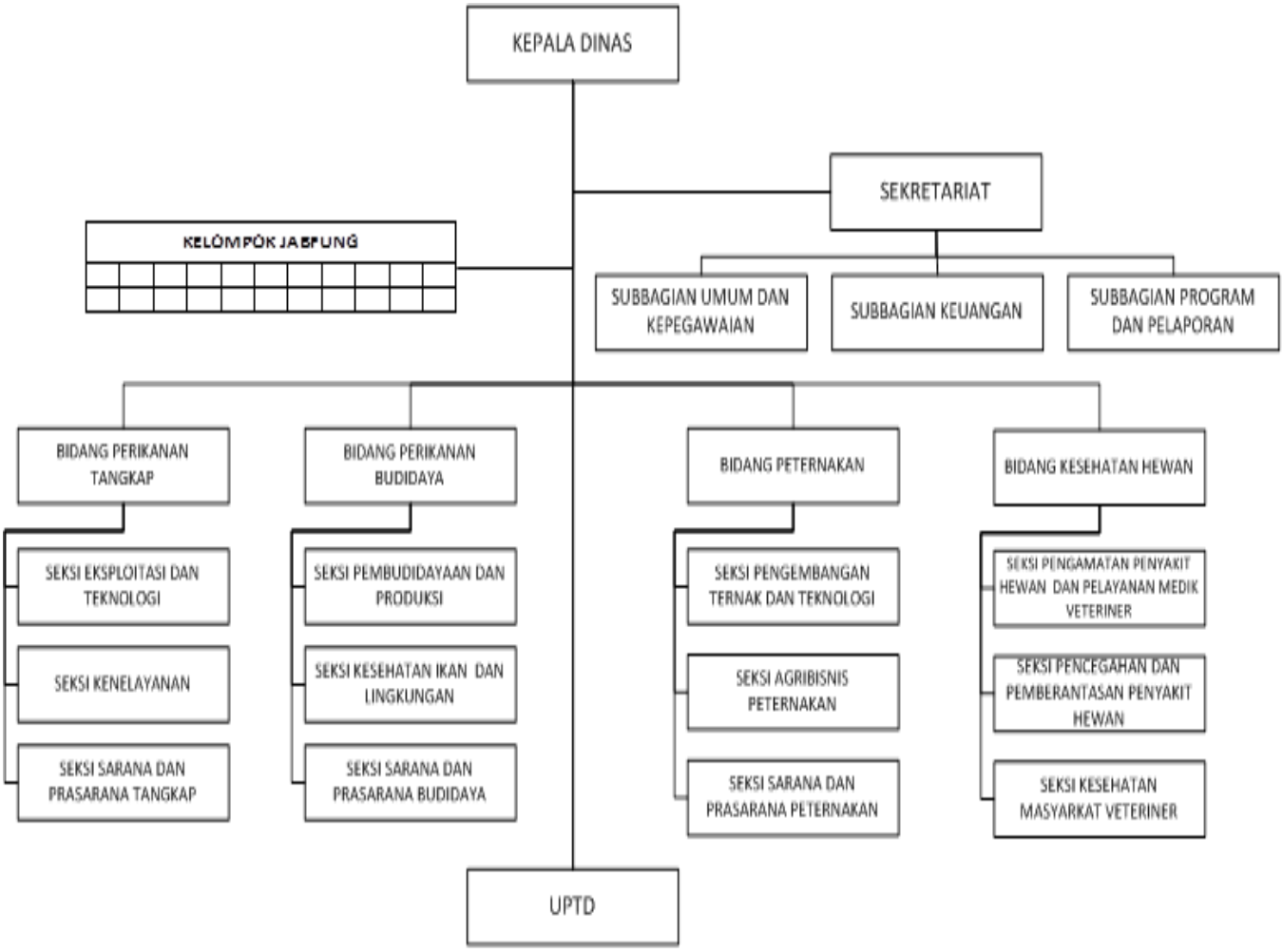

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumberdaya yang dimiliki Dinas Perikanan dan Peternakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya meliputi : sumberdaya manusia, sarana dan prasarana penunjang operasional (asset/modal) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara rinci sumberdaya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.2.1 Jumlah Pegawai

Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, profesional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Jumlah pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban pada Tahun 2019 sebanyak 63 (Enam Puluh Tiga) orang. Secara rinci jumlah pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)
1	Pegawai Negeri Sipil Daerah	63
2	Pegawai Negeri Sipil Pusat	3
3	Tenaga Penyuluh Kontrak Pusat	13
	Jumlah	79

b. Jumlah Pegawai Daerah berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Doktor	1
2	Magister	1
3	Sarjana	20
4	Sarjana Muda	11
5	SLTA	29
6	SLTP	1
7	SD	0
	Jumlah	63

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Pembina Utama Muda	IV/ c	1
	Pembina Tingkat I	IV/b	0
	Pembina	IV/a	5
2	Penata Tingkat I	III/d	10
	Penata	III/c	11
	Penata Muda Tingkat I	III/b	8
	Penata Muda	III/a	6
3	Pengatur Tingkat I	II/d	11
	Pengatur	II/c	5
	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	6
	Pengatur Muda	II/a	0
	Jumlah		63

2.2.2 Perlengkapan

Sarana dan prasarana di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban awal Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Tanah

No	Jenis Sarana	Luas	Satuan
1	Kolam Air Tawar (BBI Jojogan)	10.417	m2
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (BBI Banjararum)	18.574	m2
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Kantor Dinas)	1.256	m2
4	Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan (Tambakboyo)	1.044	m2
5	Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan (Karangagung)	22.900	m2

b. Alat Besar

No	Jenis Sarana	Jumlah	Satuan
1	Crawler Tractor	1	Unit
2	Crawler Tractor	1	Unit
3	Clawler Excavator	1	Unit
4	Transportable Electric Generating Set	1	Unit

c. Alat Angkutan

No	Jenis Sarana	Jumlah	Satuan
1	Staion Wagon	2	Unit
2	Mobil Kendaraan Bermotor Penumpang Lain-lain	1	Unit
3	Sepeda Motor	37	Unit
4	Micro Bus (Penumpang 15-30 orang)	1	Unit

No	Jenis Sarana	Jumlah	Satuan
5	Gerobak Dorong	10	Unit
6	Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya	1	Unit

d. Alat Bengkel dan Ukur

No	Jenis Sarana	Jumlah	Satuan
1	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	2	Unit
2	Timbangan	2	Unit
3	Kilogram Standar	3	Unit
4	Timbangan Barang	4	Unit

e. Alat Pertanian

No	Jenis Sarana	Jumlah	Satuan
1	Pacul	1	Buah
2	Alat Panen/Pengolahan Lain-lain	2	Buah
3	Selo (Kotak Penyimpan) dengan mengatur temperatur	1	Buah
4	Alat Laboratorium Pertanian Lain-lain	2	Buah
5	Jaring Angkat Lainnya	1	Buah
6	Guiding Barrier (Serok)	1	Buah
7	Bak Pemeliharaan Sementara	17	Buah
8	Alat Produksi Perikanan Lain-lain	29	Buah
9	Alat Panen Lain-lain	2	Buah
10	Lemari Penyimpanan	2	Buah
11	Alat Penyimpanan Lain-lain	6	Buah

f. Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga

No	Jenis Sarana	Jumlah	Satuan
1	Rak Besi/Metal	9	Buah
2	Rak Kayu	5	Buah
3	Filling Besi/Metal	8	Buah
4	Lemari Kaca	6	Buah
5	Alat Penyimpanan Perlengkapan kantor lainnya	5	Buah
6	White Board	2	Buah
7	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	10	Buah
8	Lemari Kayu	11	Buah
9	Meja Kayu/Rotan	1	Buah
10	Meja Rapat	4	Buah
11	Meja Tulis	36	Buah
12	Kursi Tamu	3	Buah
13	Kursi Putar	8	Buah
14	Kursi Lipat	15	Buah
15	Meja Biro	2	Buah
16	Mesin Potong Rumput	2	Buah
17	Lemari Es	1	Buah
18	AC Unit	6	Buah

No	Jenis Sarana	Jumlah	Satuan
19	AC Split	3	Buah
20	Kipas Angin	1	Buah
21	Tabung Gas	1	Buah
22	Radio	5	Buah
23	Televisi	2	Buah
24	Loudspeaker	4	Buah
25	Sound System	1	Buah
26	Microphone Table Stand	1	Buah
27	Timbangan Barang	21	Buah
28	Handy Cam	3	Buah
29	Alat Rumah Tangga Lain-lain	28	Buah
30	Mini Komputer	1	Buah
31	Local Area Network (LAN)	9	Buah
32	Personal Komputer Lain-lain	1	Buah
33	Lap Top	16	Buah
34	Note Book	13	Buah
35	Printer	14	Buah
36	Plotter	1	Buah
37	Peralatan Mini Komputer Lain-lain	4	Buah
38	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	1	Buah
39	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah
40	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	Buah
41	Meja Tamu Ruangan Biasa	4	Buah
42	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	1	Buah
43	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah
44	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	Buah
45	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2	Buah
46	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	12	Buah
47	Megaphone	2	Buah
48	Unit Power Supply	1	Buah
49	Amplifier	2	Buah
50	Brankas	4	Buah
51	P.C Unit	7	Buah

g. Alat-Alat Studio dan Komunikasi

No	Jenis Sarana	Jumlah	Satuan
1	Proyektor + Attachment	3	Unit
2	Audio Amplifier	1	Unit
3	Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain	1	Unit
4	Telephone (PABX)	1	Unit
5	Unit Transceiver SSB Transportable	1	Unit
6	Alat komunikasi Radio HF/FM Lain-lain	5	Unit
7	GPS	1	Unit

h. Alat-Alat Laboratorium

No	Jenis Sarana	Jumlah	Satuan
1	Spectro Photo Meter	1	Buah
2	Upper Leather Water Proff Ness Tester	1	Buah
3	Hot Plate	1	Buah
4	Alat Lab. Kimia Lain-Lain	2	Buah
5	Haemocytometer	1	Buah
6	Colony Counter	1	Buah
7	Alat Laboratorium Lainnya (Lain-Lain)	3	Buah
8	Disstein Set	1	Buah
9	Pipa Plastik	1	Buah
10	Mikroskop	2	Buah
11	Coulometer	1	Buah
12	Soil PH Meter	1	Buah
13	Peralatan Hidrologi Lain-lain	1	Buah
14	DO Meter	1	Buah
15	Refractometer	1	Buah
16	Oven	1	Buah
17	PH Meter	3	Buah
18	Alat Laboraorium Penunjang Lain-lain	19	Buah
19	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	2	Buah

i. Bangunan Gedung

No	Jenis Sarana	Jumlah	Satuan
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	9	Buah
2	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	5	Buah
3	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	2	Buah
4	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	Buah
5	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	2	Buah
6	Gedung Garasi/Pool Permanen	2	Buah
7	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	2	Buah
8	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	2	Buah
9	Rumah Negara Golongan II Type B Permanen	2	Buah
10	Gedung Pos Jaga Permanen	8	Buah
11	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	15	Buah

j. Jalan dan Jembatan

No	Jenis Sarana	Jumlah	Satuan
1	Jalan Desa Lain-lain	100	m2
2	Jalan Khusus Lain-lain	200	m2
3	Jalan Desa Lain-lain	160	m2

k. Bangunan Air

No	Jenis Sarana	Jumlah	Satuan
1	Bangunan Pengambilan Irigasi Lain-lain	1	Unit
2	Saluran Sekunder	1	Unit
3	Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain	1	Unit
4	Saluran Tertier Pembuang	1	Unit
5	Bangunan Perlengkapan Dalam Petak Tersiar	1	Unit
6	Saluran Sekunder Pembuang	1	Unit
7	Sumur dengan Pompa	2	Unit
8	Bangunan Pengambilan Pengemb. Lain-lain	1	Unit
9	Bangunan Pengambilan dari Sumber Air	1	Unit
10	Bangunan Pengambilan Air Bersih Lain-lain	1	Unit
11	Dermaga	2	Unit
12	Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain	8	Unit
13	Bangunan Dermaga	24	Unit
14	Lain-lain	5	Unit

l. Jaringan

No	Jenis Sarana	Jumlah	Satuan
1	Jaringan Distribusi Lain-lain	15	Unit
2	Jaringan Pembawa Lain-lain	1	Unit
3	Jaringan Induk Distribusi Lain-lain	9	Unit

m. Buku Perpustakaan

No	Jenis Sarana	Jumlah	Satuan
1	Buku Umum Lain-lain	4	Buah
2	Hukum	3	Buah

n. Hewan, Ternak dan Tanaman

No	Jenis Sarana	Jumlah	Satuan
1	Binatang Ikan Lain-lain	19	Ekor
2	Tanaman Holtikultura Lain-lain	5	Batang

2.2.3 Pendapatan

Pendapatan OPD Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan, Pendapatan Balai Benih Ikan berupa hasil penjualan bibit ikan, Rumah Potong Hewan dan Lain-Lain Pendapatan yang sah. Realisasi PAD tahun 2015 adalah sebesar Rp. 1.096.658.988,00. Rincian PAD sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban Tahun 2015

No	Sumber PAD	Jumlah (Rp.)
1	Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan (TPI)	919.416.177,00
2	Pendapatan Balai Benih Ikan (BBI)	28.500.000,00
3	Rumah Potong Hewan (RPH)	64.966.000,00
4	Lain-Lain Pendapatan yang sah	83.776.811,00
	Jumlah Total (Rp.)	**1.096.658.988,00**

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa kinerja hasil pembangunan bidang perikanan dan kelautan Kabupaten Tuban tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut :

2.3.1 Perkembangan Produksi Perikanan

Perkembangan produksi perikanan berdasarkan cabang usaha di Kabupaten Tuban tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Perkembangan Produksi Perikanan Tahun 2011 – 2015 berdasarkan Cabang Usaha

No	Uraian	Produksi (Ton)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Perikanan Tangkap	11.355,04	11.454,05	11.570,95	11.788,58	12.012,70
	Laut	*9.477,21*	*9.567,38*	*9.617,10*	*9.808,39*	*10.010,07*
	Perairan Umum	*1.877,83*	*1.886,67*	*1.953,85*	*1.980,19*	*2.002,63*
2	Perikanan Budidaya	10.095,44	11.317,76	12.781,22	14.695,39	30.252,00
	Tambak	*3.381,46*	*4.037,16*	*4.432,13*	*5.037,97*	*13.614,18*
	Sawah Tambak	*6.039,95*	*6.495,05*	*7.501,39*	*8.687,24*	*7.456,10*
	Kolam	*596,30*	*648,25*	*704,89*	*773,04*	*8.554,78*
	Karamba Jaring Apung	*77,73*	*137,30*	*142,81*	*197,14*	*626,94*
	Jumlah Total	**21.450,48**	**22.771,81**	**24.352,17**	**26.483,97**	**42.264,70**

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan, 2015

Produksi perikanan Kabupaten Tuban pada akhir tahun 2015 tercatat sebesar 42.264,70 ton yang terdiri atas cabang usaha penangkapan sebesar 12.012,70 ton (28,42%) dan cabang usaha budidaya sebesar 30.252,00 ton (71,58%). Secara umum rata-rata peningkatan produksi perikanan pada

periode waktu tahun 2012 – 2015 adalah sebesar 20,36%. Peningkatan produksi ini didominasi dari cabang usaha budidaya, dimana usaha budidaya adalah kegiatan usaha dan teknologi memproduksi biota akuatik (ikan dalam arti yang luas) secara terkontrol dalam rangka mendapatkan keuntungan yang mengandung arti bahwa meskipun masih dipengaruhi kondisi alami, namun tingkat produktifitas sangat dipengaruhi oleh campur tangan manusia. Hal ini disebabkan adanya upaya yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban yang antara lain melalui pengembangan usaha intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi komoditas budidaya baik melalui anggaran APBD Kabupaten Tuban, APBD Provinsi maupun APBN. Disamping itu juga pembinaan penerapan pola cara berbudidaya ikan yang baik (CBIB) sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 02/MEN/2007.

Produksi usaha penangkapan ikan pada akhir tahun 2015 tercatat sebesar 12.012,70 ton (laut : 10.010,07 ton, perairan umum : 2.002,63 ton). Berbeda dengan cabang usaha budidaya, meskipun sudah menggunakan teknologi yang tinggi usaha penangkapan masih sangat bergantung pada kondisi alam sesuai dengan sifat dasarnya yang primitif, yaitu berburu. Disamping sifat dasar tersebut, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan masih berkisar di sepanjang perairan pantai (± 30 mil) sehingga tingkat eksploitasi di sepanjang perairan tersebut cukup tinggi (*over fishing*) dibandingkan dengan stock potensi sumberdaya ikan yang tersedia (*stock assessment*), kondisi cuaca yang kurang mendukung dimana sering terjadi gelombang yang tinggi, adanya penangkapan ikan yang kurang bijaksana, banyaknya nelayan melakukan penangkapan keluar daerah (andon) terutama untuk alat purse seine dan dogol serta dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang merupakan faktor pendukung usaha penangkapan sehingga berpengaruh terhadap hasil tangkapan akibat adanya efisien atau pengurangan waktu tangkap.

Selain konsentrasi usaha penangkapan, spesifikasi alat tangkap juga berpengaruh terhadap kelangsungan hidup biota laut yang menjadi target penangkapan. Kenyataan di lapangan masih ditemukan bahwa masih ada penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Hal ini menyebabkan siklus hidup biota tidak dapat berlangsung dengan baik dimana biota dengan ukuran kecil (anakan) ikut tertangkap sehingga pada akhirnya stock ikan

akan mengalami penurunan. Selain itu juga banyaknya nelayan melakukan penangkapan ke luar daerah (andon) terutama alat purse seine dan dogol.

Upaya yang ditempuh Dinas Perikanan dan Kelautan dalam rangka meningkatkan produksi sepanjang kurun waktu 2011 – 2015 adalah dengan melakukan kegiatan penanaman terumbu karang buatan di Perairan Kabupaten Tuban. Kegiatan ini dimaksudkan agar tercapai pemulihan kembali habitat ekosistem tempat berkembang biak biota laut yang pada akhirnya diharapkan dapat berdampak pada stock ikan. Upaya lain dalam meningkatkan produksi adalah dengan melakukan kegiatan pengelolaan dan pelestarian ekosistem sungai pasang surut dan pantai sebagai kawasan konservasi hutan bakau serta pengembangan sarana penangkapan ikan dan bantuan alat tangkap bagi nelayan.

2.3.2 Perkembangan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan

Perkembangan produksi pengolahan hasil perikanan menurut jenis olahan tahun 2011 – 2015 seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Perkembangan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2011 – 2015 berdasarkan Jenis Olahan

No	Jenis Olahan	Produksi (Ton)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pengeringan	5.168,22	5.559,45	5.754,03	6.179,83	5.217,34
2	Pindang	257,04	280,23	294,24	309,25	2.151,97
3	Pengasapan	521,47	568,72	594,31	612,14	3.048,15
4	Peng-Esan	2.612,62	2.828,16	2.957,04	2.997,82	1.128,00
5	Terasi/Fermentasi	88,67	93,43	96,23	107,78	8.616,44
6	Cold Storage	108,88	116,62	120,11	126,12	480,00
7	Lain-Lain	6,86	7,38	7,60	21,17	207,96
	Jumlah	**8.763,76**	**9.453,99**	**9.823,56**	**10.354,11**	**20.849,86**

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan, 2015

Produksi pengolahan hasil perikanan pada akhir tahun 2015 tercatat sebesar 20.849,86 ton. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari perkembangan produksi baik usaha penangkapan maupun usaha budidaya ikan. Untuk menunjang kegiatan usaha pengolahan hasil perikanan dilaksanakan melalui program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dengan kegiatan bimtek pengembangan pengolahan

produk bernilai tambah (PPNT) kepada wanita pengolah ikan tradisional dan PKK, peningkatan sarana prasarana TPI, pembinaan dan pengembangan usaha mina perdesaan (PUMP) pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, optimalisasi laboratorium kesehatan ikan serta pengawasan dan monitoring penggunaan bahan kimia berbahaya dalam produk olahan hasil perikanan.

2.3.3 Perkembangan Populasi Ternak

Perkembangan populasi di Kabupaten Tuban tahun 2011 – 2015 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Perkembangan Populasi Ternak Tahun 2011 – 2015 berdasarkan Jenis Ternak

No	Jenis Ternak	Populasi (Ekor)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Sapi Potong	312.013	314.810	311.358	314.937	324.295
2	Sapi Perah	1.735	1.791	1.794	443	189
3	Kerbau	1.993	1.993	1.840	1.875	1.448
4	Kuda	458	458	347	347	67
5	Kaming	81.041	81.708	105.639	115.623	118.797
6	Domba	70.261	71.144	75.402	77.288	84.972
7	Babi	240	250	260	300	300
8	Ayam Buras	826.341	826.988	1.005.860	1.243.668	1.312.880
9	Ayam Ras Petelur	168.752	170.960	101.405	155.918	192.475
10	Ayam Ras Pedaging	942.700	944.950	1.159.545	9.351.072	10.632.108
11	Itik	33.951	34.644	65.777	70.587	58.900
12	Entog	36.422	36.606	80.593	81.189	175.870

Sumber : Dinas Pertanian, 2015

Populasi ternak Kabupaten Tuban pada akhir tahun 2015 tercatat sebanyak 12.902.301 ekor dengan rincian sebagaimana pada tabel diatas. Dalam rangka peningkatan populasi ternak, dilakukan dengan program peningkatan produksi hasil peternakan melalui kegiatan optimalisasi inseminasi buatan, pengembangan budidaya sapi potong, pengembangan ternak domba dan kambing.

2.3.4 Perkembangan Produksi Hasil Peternakan

Perkembangan produksi hasil peternakan tahun 2011 – 2015 seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Perkembangan Produksi Hasil Peternakan Tahun 2011 – 2015 berdasarkan Jenis Produksi

No	Jenis Produksi	Produksi (kg/th)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Daging	13.148.081	10.583.085	13.841.805	16.041.937	17.745.478
2	Telur	3.236.314	3.270.709	3.240.488	2.672.025	3.213.764
3	Susu	1.034.880	1.068.283	1.070.072	278.831	139.632

Sumber : Dinas Pertanian, 2015

Rata-rata perkembangan produksi daging pada periode tahun 2011 – 2015 adalah sebesar 9,45%. Hal ini dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah peternak yang melakukan usaha di bidang penggemukan ayam potong. Adapun produksi susu pada akhir tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 49,92%. Penurunan tersebut dipengaruhi berkurangnya populasi sapi perah yang ada di Kabupaten Tuban.

Adapun hasil kinerja pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban diukur dari tingkat pencapaian terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator tersebut meliputi : 1) Jumlah produksi perikanan; 2) Jumlah produksi peternakan; 3) Tingkat konsumsi ikan dan 4) Tingkat konsumsi protein hewani. Secara rinci hasil kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban selama periode 3 tahun terakhir (2013 – 2015) seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban Tahun 2013 – 2015

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra OPD Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	24.322,87	26.175,36	28.249,02	24.352,17	26.483,97	42.264,70	100,12	101,18	149,61
2	Jumlah Produksi Peternakan (Ekor)	7.386.211	9.683.044	9.784.577	8.707.185	11.412.847	12.902.301	117,88	117,86	131,86
3	Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Th)	24,48	25,09	25,72	31,44	31,44	31,75	111,85	125,31	123,44
4	Tingkat Konsumsi Protein Hewani (Kg/Kapita/Th)	1,97	2,00	2,04	2,39	2,59	2,90	121,45	129,44	142,23
	Rata-Rata							112,83	118,45	136,79

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan, 2015 dan Dinas Pertanian, 2015

Dari tabel tersebut terlihat bahwa rasio pencapaian kinerja yang telah dicapai Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban adalah sangat baik. Hal ini dapat dicapai dengan dukungan seluruh stakeholder terkait baik

yang secara langsung maupun tak langsung terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Namun demikian keberhasilan tersebut tidak berarti tidak mempunyai kendala dan permasalahan. Permasalahan dalam upaya meningkatkan produksi penangkapan ikan antara lain adalah terkonsentrasinya kegiatan usaha penangkapan di perairan pantai yang ditunjukkan dengan armada penangkapan ikan di Kabupaten Tuban sebagian besar merupakan armada kurang dari 10 GT sehingga daya jangkau masih relatif pendek (kurang dari 30 mil). Semakin menurunnya stock ikan yang disebabkan rusaknya habitat tempat hidup ikan sebagai akibat kurang bijaksananya eksploitasi yang dilakukan baik oleh nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

Anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban pada kurun waktu 2011 – 2015 seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban Tahun 2011 – 2015

Tahun Ke	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio antara Realisasi dan Anggaran	Pertumbuhan	
				Anggaran	Realisasi
1	8.932.303.250,00	7.914.074.190,00	88,60		
2	11.784.150.900,00	10.888.121.095,00	92,40	31,93	37,58
3	10.446.296.000,00	8.847.790.875,00	84,70	-11,35	-18,74
4	13.173.731.100,00	12.796.820.674,00	97,14	26,11	44,63
5	10.831.125.000,00	10.458.253.121,00	96,56	-17,78	-18,27
Jumlah	55.167.606.250,00	50.905.059.955,00	92,27		
Rata-Rata	11.033.521.250,00	10.181.011.991,00	91,88	7,23	11,30

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan, 2015

Secara umum rasio antara realisasi dan anggaran pada kurun waktu 2011 – 2015 tercapai cukup baik dengan rata-rata sebesar 91,88%. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan kegiatan pembangunan anggaran yang telah direncanakan mampu terlaksana dengan baik dan mampu melakukan efisiensi anggaran sebesar 8,12%. Faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan tersebut antara lain adalah proses perencanaan dan pengelolaan kegiatan yang baik serta kinerja aparatur yang bertanggung jawab.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Proses pembangunan merupakan proses berkelanjutan dan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Hal ini berimplikasi bahwa perencanaan pembangunan harus merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembangunan nasional sehingga hasil akhir pelaksanaan pembangunan dapat tercapai dan berkesinambungan. Mengacu pada kondisi tersebut maka dalam proses penyusunan renstra perlu menganalisa program pembangunan baik tingkat nasional maupun provinsi.

Munculnya kesadaran untuk menjadikan pembangunan berbasis sumber daya kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak pembangunan nasional, tercermin dalam keputusan politik nasional, sebagaimana terimplementasi dalam Undang-undang No.17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang salah satu misinya menyatakan : Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

Berdasarkan telaah terhadap RTRW Kabupaten Tuban Tahun 2009 – 2029 bahwa pengembangan bidang perikanan dan kelautan diarahkan pada wilayah pesisir yang meliputi Kecamatan Bancar, Tambakboyo, Jenu, Tuban dan Palang sebagai pengembangan kawasan perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan serta jasa lainnya. Pengembangan bidang perikanan dan kelautan juga diarahkan pada wilayah yang memiliki potensi perairan yang meliputi Kecamatan Widang, Plumpang, Rengel, Singgahan, Merakurak dan Semanding.

Melihat hal tersebut maka tantangan bidang perikanan dan peternakan Kabupaten Tuban ke depan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, teknologi dan inovasi perikanan dan peternakan yang belum merata serta persangan pasar bebas;
2. Keterbatasan bahan baku perikanan dan peternakan untuk bahan baku industri;
3. Tuntutan penyediaan produk perikanan dan peternakan yang unggul berdaya saing dan berkelanjutan.

Sedangkan peluang pengembangan pembangunan bidang perikanan dan peternakan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kebutuhan pangan dari produk perikanan dan kelautan sebagai dampak peningkatan kesadaran masyarakat akan kesehatan;
2. Teknologi dan inovasi perikanan dan peternakan yang semakin berkembang;
3. Tingkat kebutuhan masyarakat akan konsumsi produk hasil perikanan dan peternakan semakin tinggi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan pembangunan pada kurun waktu 2011 – 2015 telah memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar produk perikanan, peternak dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Meskipun demikian tidak berarti bahwa pelaksanaan pembangunan tersebut terlepas dari permasalahan ataupun kendala. Permasalahan dan faktor penyebab permasalahan tersebut antara lain :

1. Masih rendahnya produksi perikanan tangkap;
2. Belum optimalnya produksi budidaya perikanan;
3. Pemanfaatan teknologi oleh masyarakat untuk meningkatkan daya saing serta penguatan pemasaran belum optimal;
4. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi, peduli lingkungan dan mitigasi bencana pesisir;
5. Belum optimalnya pemotongan ternak di rumah pemotongan hewan dan masih terjadi pemotongan ternak betina produktif;
6. Belum optimalnya pemanfaatan biomassa pertanian untuk pakan ternak;
7. Masih tingginya gangguan reproduksi pada ternak besar;
8. Tingginya resiko terjadinya kejadian penyakit hewan menular strategis;
9. Rendahnya kualitas pelayanan dan kemampuan sumber daya perikanan dan peternakan di pemerintah (OPD)

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2016 – 2021 adalah “Kabupaten Tuban yang lebih Religius, Bersih, Maju dan Sejahtera”. Dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut dituangkan dalam 5 (lima) misi, dimana bidang perikanan dan peternakan meliputi misi ke 4

(empat) : Membangun struktur ekonomi daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan lokal yang kompetitif, tujuan 4 (empat) : Peningkatan ekonomi lokal yang kuat melalui peningkatan produksi dan olahan hasil pertanian, perikanan, potensi keunggulan lokal yang berdaya saing tinggi, serta peningkatan sistem jaringan distribusi untuk pemerataan hasil pembangunan dan penyediaan lapangan kerja.

Program prioritas dalam rangka pencapaian misi ke 4 (empat) terdiri atas 7 program. Program prioritas terkait bidang perikanan dan peternakan meliputi :

(1) Pengembangan perikanan tangkap.

(2) Pengembangan perikanan budidaya.

(3) Pemberdayaan usaha garam rakyat.

(4) Peningkatan Produksi Peternakan.

(5) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan.

(6) Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan.

(7) Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Peternakan.

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Tuban terkait visi pemerintah Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya produksi perikanan tangkap;
2. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya;
3. Belum optimalnya produksi dan kualitas garam;
4. Masih rendahnya produksi benih ikan;
5. Belum optimalnya produksi pengolahan produk hasil perikanan;
6. Masih rendahnya pengetahuan dinamika kelompok;
7. Masih rendahnya konsumsi ikan di masyarakat;
8. Belum optimalnya penanganan dan pengawasan pemakaian bahan tambahan makanan yang tidak direkomendasi dan abrasi pantai;
9. Belum optimalnya produksi tanaman padi, jagung, kacang tanah, tebu, tembakau, kelapa, daging, susu dan telur;
10. Belum optimalnya pengembangan sentra agribisnis

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 – 2019 adalah "Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional".

Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Visi tersebut dijabarkan dalam 3 (tiga) pilar misi, yaitu :

1. Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.
2. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.

Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni :

3. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut.
4. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya.
5. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan.

Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni :

6. Mengembangan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat.
7. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan.

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan dengan menggunakan pendekatan metoda *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni *stakeholders prespective, customer perspective, internal process perspective,* dan *learning and growth perspective*, sebagai berikut :

1. *Stakeholders Prespective* : menjabarkan misi "Kesejahteraan", maka sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah "Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP".
2. *Customer Perspective* :
   a. menjabarkan misi "Kedaulatan", maka sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah "Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP".
   b. menjabarkan misi "Keberlanjutan", maka sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah "Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan".
3. *Internal Process Perspective* :
   a. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah "Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif".
   b. Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah "Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan".
   c. Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah "Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif".

4. *Learning and Growth Perspective (input)* :

   a. Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yakni "Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berkepribadian".

   b. Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yakni "Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal, dan Mudah Diakses".

   c. Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yakni "Terwujudnya Birokrasi KKP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima".

   d. Sasaran strategis kesepuluh (SS-10) yakni "Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara Efisien dan Akuntable"

Visi Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019 adalah "Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani.

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah :

1. Mewujudkan kedaulatan pangan.
2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan.
3. Mewujudkan kesejahteraan petani.
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2015 – 2019 yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian.
3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai dalam dalam periode 2015 – 2019 adalah :

1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula.

2. Peningkatan diversifikasi pangan.
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor.
4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi.
5. Peningkatan pendapatan keluarga petani.
6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan Jawa Timur tahun 2014 – 2019 adalah :

1. Meningkatkan kontribusi sub sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB

Adapun Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah :

a. Meningkatnya kualitas kelas kelompok kelautan dan perikanan.
b. Meningkatnya produksi kelautan dan perikanan.
c. Meningkatnya nilai tambah produk hasil kelautan dan perikanan.
d. Meningkatnya pemulihan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Tujuan yang akan dicapai dalam pembangunan peternakan Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi peternakan.
2. Meningkatkan nilai tambah produk peternakan.
3. Meningkatkan kemampuan kelompok peternak

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pembangunan perikanan dan peternakan juga turut memperhatikan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH). SDA-LH sangat penting dalam pembangunan nasional, baik sebagai penyedia bahan baku bagi pembangunan ekonomi maupun sebagai pendukung sistem kehidupan. Sesuai dengan fungsinya tersebut, SDA-LH perlu dikelola dengan bijaksana

agar pembangunan serta keberlangsungan kehidupan manusia dapat terjaga dan lestari saat ini dan di masa yang akan datang. Selain itu, sektor-sektor yang berbasis SDA dan LH juga menjadi tumpuan utama bagi sebagian besar tenaga kerja, terutama di perdesaan dan pesisir.

Isu-isu strategis KLHS yang terkait dengan sektor perikanan dan peternakan adalah alih fungsi lahan (hutan dan pertanian); perubahan iklim; penurunan kualitas dan kuantitas sumberdaya alam; belum optimalnya pengelolaan laut dan pesisir; kesejahteraan rakyat; pertanian dan ketahanan pangan. Dalam proses penyusunan KLHS, implementasi program prioritas Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban dinilai telah berkontribusi untuk menjawab isu-isu strategis KLHS.

Pembangunan bidang perikanan dan peternakan diharapkan serasi dan selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini berimplikasi bahwa pembangunan bidang perikanan dan peternakan yang direncanakan harus sejalan dengan pembangunan Kabupaten Tuban secara menyeluruh.

Beberapa arahan pengembangan dan strategis dalam Review RTRW 2009 – 2029 dan KLHS bidang perikanan dan peternakan antara lain sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap ekosistem kawasan sempadan pantai untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai yang meliputi hutan bakau (mangrove), padang lamun dan terumbu karang disamping sebagai tempat berkembang biak habitat laut, pelindung pantai dan pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya di belakangnya;
2. Pengembangan kawasan industri di sepanjang pantai Utara Pulau Jawa;
3. Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Palang dan Karangagung;
4. Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Bancar dan Palang;
5. Pengembangan pariwisata kawasan berhutan bakau di wilayah sepanjang pantai utara;
6. Perlindungan dan pemanfaatan kawasan sempadan sungai, waduk untuk kegiatan ekonomi masyarakat;
7. Pengembangan sentra ternak sapi potong.

Faktor penghambat terkait arahan pengembangan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Struktur pantai yang berpasir halus dan landai menyebabkan sulitnya penanaman dan rehabilitasi hutan mangrove;
2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian dan perlindungan ekosistem pesisir.

Adapun faktor pendorong dalam rangka mewujudkan arahan pengembangan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Adanya kelompok masyarakat yang telah mengembangkan kawasan perlindungan pantai dengan penanaman bakau;
2. Tersedianya dukungan regulasi baik dari tingkat pusat maupun daerah;
3. Dukungan pihak ketiga melalui Corporate Social Responsibility (CSR).
4. Adanya kelompok masyarakat yang telah mengembangkan ternak sapi potong.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan kajian dan analisis dan kajian terhadap keseluruhan faktor yang berpengaruh terhadap pembangunan bidang perikanan dan peternakan, isu strategis yang berkembang adalah sebagai berikut :

1. Overfishing di Laut Jawa;
2. Kebijakan nasional pasar bebas MEA
3. Ikan, daging, telur dan susu sebagai sumber protein hewani penyediaan bahan ketahanan pangan nasional;
4. Semaraknya pemakaian bahan kimia berbahaya sebagai pengawet;
5. Integritas penataan ruang pesisir dan laut;
6. Pemberdayaan masyarakat dan Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha perikanan dan peternakan agar memiliki daya saing kokoh dan berkelanjutan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan pembangunan perikanan dan peternakan Kabupaten Tuban tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Meningkatanya Kontribusi Sub Sektor Perikanan dan Peternakan terhadap PDRB;

4.2 Sasaran

Sasaran strategis pembangunan perikanan dan peternakan berdasarkan tujuan yang akan dicapai meliputi :

1. Meningkatnya Produksi Potensi Unggulan Perikanan dan Peternakan;
2. Meningkatnya Nilai Tambah Produk Perikanan dan Peternakan.

Secara rinci tujuan dan sasaran Dinas Perikanan dan Peternakan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 8. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kontribusi sub sektor perikanan dan peternakan terhadap PDRB		Persentase pertumbuhan sub kategori perikanan dan peternakan terhadap PDRB	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
		Meningkatnya produksi perikanan dan peternakan	Persentase peningkatan produksi perikanan (%)	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
			Persentase peningkatan populasi ternak (%)	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
		Meningkatnya nilai tambah produk perikanan dan peternakan	Persentase peningkatan nilai tambah produk perikanan (%)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
			Persentase peningkatan nilai tambah produk peternakan (%)	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Sesuai arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021 dari 5 (lima) misi yang telah ditetapkan, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban menindaklanjuti misi ke 4 (empat), tujuan 4 (empat) yaitu Peningkatan ekonomi lokal yang kuat melalui konektivitas antar wilayah, peningkatan produktivitas pertanian, perikanan dan kelautan, serta potensi keunggulan lokal yang berdaya saing tinggi untuk pemerataan hasil pembangunan dan penyediaan lapangan kerja, maka strategi Dinas Perikanan dan Peternakan diimplementasikan sebagai berikut :

3. Penerapan teknologi perikanan dan peternakan.
4. Peningkatan SDM dan kelembagaan perikanan dan peternakan
5. Fasilitasi sarana dan prasarana perikanan dan peternakan

5.2 Kebijakan

Adapun kebijakan Dinas Perikanan dan Peternakan sesuai arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan perikanan tangkap.
2. Pengembangan perikanan budidaya.
3. Pemberdayaan usaha garam rakyat.
4. Pengembangan produksi peternakan.
5. Pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan.
6. Optimalisasi pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan.
7. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
8. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perikanan dan Peternakan.

Program pembangunan perikanan dan peternakan di RPJMD yang menjadi tanggung jawab Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban terdiri dari 7 program, yaitu :

1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

   Kegiatan-kegiatan pada program ini diarahkan untuk peningkatan kuantitas dan kualitas produksi perikanan tangkap melalui pemanfaatan teknologi dan alat tangkap ramah lingkungan, penguatan kapasitas kelembagaan kelompok nelayan serta pengembangan sarana prasarana.

2. Program Pengembangan Perikanan Budidaya

   Kegiatan-kegiatan pada program ini diarahkan untuk peningkatan kuantitas dan kualitas produksi perikanan budidaya melalui pemanfaatan teknologi budidaya ikan yang tepat guna, penguatan kapasitas kelembagaan kelompok pembudidaya ikan dan pengembangan sarana prasarana.

3. Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat

   Kegiatan-kegiatan pada program ini diarahkan untuk peningkatan produksi garam rakyat dengan penerapan teknologi inovatif dan perbaikan sarana prasarana.

4. Program Peningkatan Produksi Peternakan

   Kegiatan-kegiatan pada program ini diarahkan untuk peningkatan produksi peternakan melalui pemanfaatan teknologi peternakan tepat guna, peningkatan kapasitas kelembagaan usaha dan peningkatan sarana prasarana.

5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

   Kegiatan-kegiatan pada program ini diarahkan untuk menurunkan tingkat kematian ternak melalui pengamatan, pencegahan dan pengendalian penyakit hewan.

6. Program Optimalisasi pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan

   Kegiatan-kegiatan pada program ini diarahkan untuk peningkatan penyediaan bahan pangan ikan yang memenuhi standar melalui pemantauan dan pembinaan kesehatan ikan dan lingkungan, serta gerakan memasyarakatkan makan ikan.

7. Program Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner

   Kegiatan-kegiatan pada program ini diarahkan untuk peningkatan penyediaan bahan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) dengan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner, peningkatan sarana prasarana rumah potong hewan (RPH) dan gerakan memasyarakatkan makan telur dan minum susu.

Untuk program rutin kesekretariatan perkantoran sebagai pendukung program pembangunan terdiri atas 3 program, yaitu :

1. Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana terlampir.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati sudah barang tentu kinerja yang diselenggarakan harus mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Indikator kinerja OPD Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 9. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Persentase peningkatan produksi perikanan (%)	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
2	Persentase peningkatan populasi ternak (%)	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
3	Persentase peningkatan nilai tambah produk perikanan (%)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
4	Persentase peningkatan nilai tambah produk peternakan (%)	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) pembangunan perikanan dan peternakan adalah merupakan bentuk rencana program kerja peningkatan peran kinerja yang disusun atas dasar visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan strategis dengan mengacu pada kajian dan analisis terhadap visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tuban untuk jangka waktu 2016 – 2021.

Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tuban akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas, acuan dan tolok ukur kinerja dinas. Oleh karena itu substansi dan muatan Renstra OPD dibatasi hanya pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dibiayai.

Dengan mempertimbangkan potensi, sarana dan prasarana serta kemampuan yang ada menjadi pendorong dalam mewujudkan sasaran pembangunan bidang perikanan dan peternakan sesuai program yang telah ditetapkan.

Semoga rencana strategis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

L A M P I R A N

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Tuban

Tabel TC.27
Rencana Program, Kegiatan, Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Tuban

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(Outcome)* , dan Kegiatan *(Output)*	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan kontribusi sub sektor perikanan dan peternakan terhadap PDRB			**Persentase pertumbuhan sub kategori perikanan dan peternakan terhadap PDRB (%)**	**2,90**	**2,90**	**22.580,80**	**2,90**	**28.383,70**	**2,90**	**39.731,51**	**2,90**	**65.715,40**	**2,90**	**74.900,00**	**2,90**	**231.311,41**		
	Meningkatnya produksi potensi unggulan perikanan dan peternakan		**Persentase peningkatan produksi perikanan (%)**	**5,00**	**6,00**	**14.415,00**	**6,00**	**19.160,00**	**6,00**	**22.907,61**	**6,00**	**23.215,00**	**6,00**	**54.243,60**	**6,00**	**133.941,21**		
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	***Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)***	***5,00***	***7,00***	***6.150,00***	***7,00***	***10.300,00***	***7,00***	***11.253,68***	***7,00***	***13.020,00***	***7,00***	***13.020,00***	***7,00***	***53.743,68***	**Bidang Perikanan Tangkap**	
		Peningkatan pemanfaatan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan	Persentase nelayan yang menggunakan teknologi dan alat tangkap ramah lingkungan (%)	58,21	61,21	1.500,00	64,21	3.500,00	67,00	3.500,00	70,00	3.500,00	73,00	3.500,00	73,00	15.500,00		Kabupaten Tuban
		Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok nelayan	Persentase kelompok nelayan yang meningkat kelasnya (%)	0,31	3,00	450,00	3,00	600,00	3,00	1.000,00	3,00	1.000,00	3,00	1.000,00	3,00	4.050,00		Kabupaten Tuban
		Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Persentase sarana prasarana perikanan tangkap yang berfungsi dengan baik (%)	31,54	46,48	3.500,00	49,48	5.500,00	52,00	5.100,00	55,00	5.100,00	58,00	5.100,00	58,00	24.300,00		Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) se Kabupaten Tuban = 6 PPI
		Optimalisasi TPI	Persentase penyelenggaraan TPI yang berjalan dengan baik (%)	100,00	100,00	700,00	100,00	700,00	100,00	700,00	100,00	700,00	100,00	700,00	100,00	3.500,00		
		Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan)(DAK)	Jumlah bantuan kapal perikanan ukuran < 3GT (unit)						12,00	953,68	24,00	1.920,00	24,00	1.920,00	60,00	4.793,68		
		Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Bantuan Sarana Penangkapan Ikan untuk Masyarakat/ kelompok masyarakat (DBHCHT)	Jumlah kelompok yang diberdayakan (kelompok)								5,00	800,00	5,00	800,00	10,00	1.600,00		
		Program Pengembangan Perikanan Budidaya	***Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)***	***6,00***	***6,00***	***7.755,00***	***6,90***	***7.810,00***	***6,45***	***10.553,98***	***6,06***	***9.520,00***	***5,71***	***40.548,60***	***5,71***	**76.187,58**	**Bidang Perikanan Budidaya**	
		Peningkatan pemanfaatan teknologi budidaya ikan yang tepat guna	Prosentase pembudidaya yang menggunakan teknologi tepat guna (%)	5,00	6,95	4.623,00	6,70	4.656,00	6,90	5.532,00	7,70	4.572,00	7,40	23.189,16	7,40	42.572,16		Kabupaten Tuban
		Pengendalian dan pengembangan sumberdaya perikanan budidaya	Persentase orang/pelaku usaha yang memiliki sertifikasi (%)								1,00	900,00	1,20	900,00	1,20	1.800,00		Kabupaten Tuban

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(Outcome)* , dan Kegiatan *(Output)*	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya	Persentase sarana prasarana perikanan budidaya yang berfungsi dengan baik (%)	2,00	2,50	3.082,00	2,50	3.104,00	2,75	3.688,00	2,80	3.048,00	3,00	15.459,44	3,00	28.381,44		Kabupaten Tuban
		Optimalisasi Balai Benih Ikan	Persentase BBI yang memenuhi standar (%)	100,00	100,00	50,00	100,00	50,00	100,00	60,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	560,00		Kec. Rengel dan Kec. Singgahan
		Bantuan sarana produksi dan benih/bibit ikan melalui sistem Keramba Jaring Apung (DBHCHT)	Persentase pembudidaya yang menggunakan teknologi tepat guna (%)						1,99	802,79	1,99	400,00	2,00	400,00	2,00	1.602,79		Kabupaten Tuban
		Bantuan Sarana Produksi dan Ternak dengan Sistem Integrasi (DBHCHT)	Persentase kelompok yang menerapkan usaha sistem integrasi (%)						3,00	471,14	3,80	400,00	3,90	400,00	3,90	1.271,14		Kabupaten Tuban
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil (DAK)	Jumlah kelompok yang memanfaatkan teknologi dan mendapat bantuan sarpras budidaya (kelompok)								7,00	414,50			7,00	414,50		Kabupaten Tuban
		Pembangunan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan budidaya (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun/ rehab (Unit)								6,00	1.057,07			6,00	1.057,07		Kabupaten Tuban
																		Kabupaten Tuban
		Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat	***Prosentase peningkatan produksi garam rakyat (%)***	***2,00***	***2,50***	***510,00***	***2,55***	***1.050,00***	***2,60***	***1.100,00***	***2,65***	***675,00***	***2,70***	***675,00***	***2,70***	***4.010,00***	**Bidang Perikanan Budidaya**	
		Pengembangan usaha garam rakyat	Persentase mutu produk garam (%)	2,55	2,78	510,00	2,90	1.050,00	3,10	1.100,00	3,10	675,00	3,20	675,00	3,20	4.010,00		Kecamata Palang dan Tambakboyo
			Persentase peningkatan populasi ternak (%)	**2,60**	**2,60**	**5.627,10**	**2,60**	**6.480,00**	**2,60**	**11.750,20**	**2,60**	**37.376,70**	**2,60**	**15.492,70**	**2,60**	**76.726,70**		
		Program Peningkatan Produksi Peternakan	***Persentase peningkatan kelahiran ternak dan penetasan unggas(%)***	***7,69***	***7,69***	***4.614,10***	***10,00***	***4.830,00***	***11,04***	***10.217,20***	***12,28***	***13.226,70***	***14,58***	***12.642,70***	***14,58***	***45.530,70***	**Bidang Peternakan**	
		Pengembangan usaha peternakan	Persentase peternak yang memanfaatkan teknologi peternakan tepat guna (%)	0,81	0,81	1.535,00	0,90	2.555,00	1,09	5.458,70	1,18	5.468,20	1,55	5.483,20	1,55	20.500,10		Kabupaten Tuban
		Pengembangan kelembagaan peternakan	Persentase kelembagaan usaha peternakan yang meningkat kelasnya (%)	8,29	8,29	495,00	10,46	1.200,00	11,55	2.743,50	12,42	3.243,50	12,89	2.743,50	12,89	10.425,50		Kabupaten Tuban
		Pengembangan sarana dan prasarana peternakan	Persentase sarana prasarana peternakan yang berfungsi dengan baik (%)	23,16	23,16	2.584,10	25,64	1.075,00	27,21	2.015,00	29,41	2.015,00	28,93	1.916,00	28,93	9.605,10		Kabupaten Tuban
		Optimalisasi IB	Persentase ternak betina yang bunting (%)								1,50	1.500,00	1,50	1.500,00	1,50	3.000,00		Kabupaten Tuban
		Bantuan sarana produksi dan ternak sapi (DBHCHT)	Jumlah kelompok yang diberdayakan (kelompok)								10,00	1.000,00	10,00	1.000,00	10,00	2.000,00		Kabupaten Tuban
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	***Status Kesehatan Ternak (%)***	***50,00***	***50,00***	***1.013,00***	***50,00***	***1.650,00***	***50,00***	***1.533,00***	***50,00***	***24.150,00***	***50,00***	***2.850,00***	***50,00***	***31.196,00***	**Bidang Kesehatan Hewan**	
		Optimalisasi pengamatan peyakit hewan	Persentase cakupan pengamatan penyakit hewan (%)	0,22	0,22	75,00	0,22	75,00	0,30	100,00	0,45	200,00	0,60	250,00	0,60	700,00		Kabupaten Tuban
		Pencegahan dan pengendalian penyakit hewan (P3H)	Persentase cakupan pelayanan kesehatan hewan terpadu (%)	0,90	1,20	450,00	1,35	575,00	1,50	250,00	1,65	500,00	1,80	600,00	1,80	2.375,00		Kabupaten Tuban
		Optimalisasi Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah bahan asal hewan yang memenuhi syarat hygiene dan sanitasi (ton)	5.680,00	6.528,00	388,00	7.181,00	600,00	8.638,00	633,00	11.670,00	850,00	15.522,00	1.000,00	49.539,00	3.471,00		Kabupaten Tuban
		Optimalisasi Rumah Potong Hewan (RPH)	Persentase RPH yang memenuhi standar (%)	25,00	25,00	100,00	50,00	400,00	50,00	550,00	50,00	22.600,00	75,00	1.000,00	75,00	24.650,00		Kabupaten Tuban

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(Outcome)* , dan Kegiatan *(Output)*	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Meningkatnya nilai tambah produk perikanan dan peternakan		**Persentase peningkatan nilai tambah produk perikanan (%)**	**3,00**	**3,00**	**450,00**	**3,00**	**550,00**	**3,00**	**570,00**	**3,00**	**570,00**	**3,00**	**600,00**	**3,00**	**2.740,00**		
		Program Optimalisasi Pengolahan Produk Perikanan	***Jumlah produksi olahan hasil perikanan (ton)***	***20.849,86***	***22.934,85***	***350,00***	***22.934,85***	***400,00***	***27.104,82***	***410,00***	***29.189,80***	***410,00***	***31.274,79***	***425,00***	***133.439,11***	***1.995,00***	**Bidang Perikanan Tangkap**	
		Pemberdayaan kelompok pengolahan dan pemasaran produk perikanan yang Berstandar Mutu Baik	Persentase orang/pelaku usaha yang memiliki sertifikasi/surat keterangan standar mutu (%)	0,31	0,31	350,00	5,00	400,00	5,00	410,00	5,00	410,00	5,00	425,00	5,00	1.995,00		Kabupaten Tuban
		Program Optimalisasi Konsumsi dan Pemasaran Hasil Perikanan	***Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kap/th)***	***31,75***	***35,01***	***100,00***	***36,76***	***150,00***	***38,60***	***160,00***	***40,53***	***160,00***	***42,56***	***175,00***	***42,56***	***745,00***	***Bidang Perikanan Tangkap***	
		Gerakan memasyarakatkan Makan Ikan dalam rangka Peningkatan Konsumsi Ikan pada Masyarakat, Anak Usia Sekolah dan Ibu PKK	Jumlah peserta Gemarikan (orang)		350,00	100,00	500,00	150,00	500,00	160,00	500,00	160,00	500,00	175,00	2.350,00	745,00		Kabupaten Tuban
			Persentase peningkatan Nilai Tambah Produk Peternakan (%)	**2,20**	**2,20**	**75,00**	**2,20**	**180,00**	**2,20**	**550,00**	**2,20**	**2.540,00**	**2,20**	**2.550,00**	**2,20**	**5.895,00**		
		Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Peternakan	***Tingkat Konsumsi protein hewani (kg/kap/th)***	***2,90***	***3,08***	***75,00***	***3,15***	***150,00***	***3,22***	***550,00***	***3,30***	***2.500,00***	***3,38***	***2.500,00***	***3,38***	**5.775,00**	**Bidang Peternakan**	
		Ekspose pengolahan dan pemasaran produk hasil peternakan	Persentase pelaku usaha pengolaha dan pemasaran yang mengikuti ekspose (%)		1,00	75,00	2,00	150,00	3,00	550,00	5,00	2.500,00	5,00	2.500,00	5,00	5.775,00		Kabupaten Tuban
		Program Optimalisasi Pengolahan Produk Peternakan	***Jumlah produksi olahan hasil peternakan (ton)***	***21.095,07***	***22.314,50***	***0,00***	***22.830,38***	***30,00***	***23.359,74***	***0,00***	***23.902,99***	***40,00***	***24.460,53***	***50,00***	***116.868,14***	***120,00***	**Bidang Peternakan**	
		Pengembangan sentra Pembuatan Produk Olahan Daging	Jumlah kawasan yang dikembangkan (lokasi)	0,00	32,00	0,00	1,00	30,00	0,00	0,00	1,00	40,00	1,00	50,00	3,00	120,00		Kabupaten Tuban
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan		**Nilai AKIP perangkat daerah**	**B**	**B**	**2.013,70**	**B**	**2.013,70**	**B**	**4.013,70**	**BB**	**2.013,70**	**A**	**2.013,70**	**A**	**12.068,50**		
		Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	***Angka indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran (%)***	***80,00***	***80,00***	***1.544,10***	***80,00***	***1.544,10***	***80,00***	***3.544,10***	***80,00***	***1.544,10***	***80,00***	***1.544,10***	***80,00***	***9.720,50***	**Sekretariat**	
		Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah jasa administrasi perkantoran (jenis jasa)	7,00	7,00	583,50	7,00	583,50	7,00	583,50	7,00	583,50	7,00	583,50	7,00	2.917,50		Kabupaten Tuban
		Penyediaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan perkantoran (jenis)	5,00	5,00	313,60	5,00	313,60	5,00	313,60	5,00	313,60	5,00	313,60	5,00	1.568,00		Kabupaten Tuban
		Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana Perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (jenis)	5,00	5,00	497,00	5,00	497,00	5,00	497,00	5,00	497,00	5,00	497,00	5,00	2.485,00		Kabupaten Tuban
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang diadakan (jenis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1.000,00		Kabupaten Tuban

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(Outcome)* , dan Kegiatan *(Output)*	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti (kali)	125,00	125,00	150,00	125,00	150,00	125,00	150,00	125,00	150,00	125,00	150,00	625,00	750,00		Luar Kabupaten Tuban
		Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab (unit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.000,00		Kabupaten Tuban
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	***Prosentase aparatur OPD memiliki kompetensi di bidangnya (%)***	***80,00***	***80,00***	***263,90***	***80,00***	***263,90***	***80,00***	***263,90***	***80,00***	***263,90***	***80,00***	***263,90***	***80,00***	***1.319,50***	**Sekretariat**	
		Peningkatan Kapasitas PNS	Jumlah PNS yang meningkat kapasitasnya (orang)	151,00	151,00	150,00	151,00	150,00	151,00	150,00	151,00	150,00	151,00	150,00	151,00	750,00		Kabupaten Tuban
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan (paket)	1,00	1,00	58,90	1,00	58,90	1,00	58,90	1,00	58,90	1,00	58,90	5,00	294,50		Kabupaten Tuban
		Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang meningkat kompetensinya (orang)	69,00	69,00	55,00	69,00	55,00	69,00	55,00	69,00	55,00	69,00	55,00	69,00	275,00		Kabupaten Tuban
		Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	***Nilai AKIP SKPD***	***B***	***B***	***205,70***	***B***	***205,70***	***B***	***205,70***	***BB***	***205,70***	***A***	***205,70***	***A***	***1.028,50***	**Sekretariat**	
		Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen (jenis)	6,00	6,00	50,00	6,00	50,00	6,00	50,00	6,00	50,00	6,00	50,00	50,00	250,00		Kabupaten Tuban
		Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan (jenis)	9,00	9,00	155,70	9,00	155,70	9,00	155,70	9,00	155,70	9,00	155,70	45,00	778,50		Kabupaten Tuban